



DISHUB NATUNA

Rencana Kerja (Renja)



Dinas Perhubungan
Kabupaten Natuna
Tahun 2026



Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung B Pulau Senoa Lantai I - Ranai Kabupaten Natuna



dishub@natunakab.go.id



Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan Renja ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 yang sudah dicapai Relisasi Anggaran dan Pendapatan tahun 2024. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Untuk keperluan penyempurnaan naskah Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 ini, maka segala macam kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak terkait dapat disampaikan kepada kami dan kami ucapkan terima kasih.

Ranai, 24 September 2025.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Natuna



ALLAZI, SE

NIP. 19670803 199303 1 001

DAFTAR ISI :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun 2024	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	36
3.3 Program dan Kegiatan	41
3.4 Cascading dan Cross Cutting	45
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna tahun 2026	47
BAB V PENUTUP	
Penutup	63

DAFTAR TABEL :

Tabel 2.1 Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2024 ...	15
Tabel 2.2 Rekap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2024	20
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2022-2024	26
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Tahun 2024	27
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2024	28
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 dari Pemangku Kepentingan	32
Tabel 3.1 Tujuan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna 2026.....	38
Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Renja Dinas Perhubungan 2026.....	40
Tabel 3.3 Rekapitulasi Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan 2026....	42
Tabel 4.1 Rencana Kerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2026	52

DAFTAR GAMBAR :

Gambar 3.4 Cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna tahun 2026	45
Gambar 3.5 Crosscutting Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029	46



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumusan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna. Proses ini bertujuan menyelaraskan rencana program dan kegiatan terhadap RKPD Tahun 2026. Secara umum tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan melalui tahap - tahap :

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
- b. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah



dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan awal

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah untuk kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang terkait yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan final dari Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.



6. Penetapan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) menyampaikan seluruh renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Daerah Dinas Perhubungan bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis karena :

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan agar terwujud sinergi dan sinkronisasi capaian kerja Tahunan Perangkat Daerah dengan rencana tahunan dan nasional, maka dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pula kepada Arah kebijakan provinsi dan nasional.
3. Renja Dinas Perhubungan merupakan acuan Dinas Perhubungan dalam menentukan Program Prioritas serta Pagu Anggaran



Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah (RAPBD).

4. Renja Dinas Perhubungan Natuna merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hingga tahun yang telah dilalui.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Natuna Tahun 2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);



- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



- 10) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi



Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041



- (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 nomor 18);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49).
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55);
- 27) Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 438).
- 28) Peraturan Bupati Natuna Natuna Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja ini ditahap selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sebagai bahan tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah menjabarkan Rencana Program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:



- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKJIP);
- c) Untuk Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencanaan, pelaksana dan pengelola perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai pada evaluasi kinerja;
- f) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pehubungan Kabupaten Natuna.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pehubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini disajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Membuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun Lalu

Salah satu tahapan dalam proses perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah pembuatan dokumen Rencana Kerja (Renja). Dokumen Rancangan Renja ini mempunyai nilai penting karena dokumen ini merupakan instrumen pelaksanaan baik RPJMD maupun Rencana Strategis. Dokumen Rencana Kerja SKPD, memuat program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD. Dokumen Rancangan Renja ini juga dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD maupun Rencana Strategis.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024.

Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna melaksanakan sebanyak 3 program, 11 kegiatan, dan 21 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp 26.333.064.896. Dalam pelaksanaannya, program tersebut



dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 16.585.431.544.52, atau serapan sebesar 62,98 persen.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.



b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Pengelolaan Pelayaran

- 1) Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- 2) Kegiatan Penerbitan Izin dan Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.
 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

2. Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja atau capaian kinerja kurang dari 75% adalah sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, indikator kinerja Jumlah Paket Mebel yang disediakan dengan realisasi kinerja sebesar 0 (Nol) dari target kinerja 5 Unit.

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), indikator kinerja Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum dengan realisasi kinerja sebesar 38,57 % (persen) dari target kinerja 68 % (persen).



3. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan atau capaian kinerja kurang dari 75%:

- a. Tidak terpenuhinya target kinerja Sub Kegiatan Pegadaan Mebel dikarenakan keterbatasan Anggaran dan tidak ada jaminan kepastian pembayaran.
- b. Belum tercapainya target Kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) karena masih Banyak Desa-desa yang belum Terlayani Moda Transportasi Umum Berupa DAMRI yang disebabkan masih terbatasnya Armada (DAMRI) dan masih kurangnya Trayek/Rute Pelayanan.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
- b. Mengusulkan Penambahan Armada (DAMRI) sehingga Rute/Trayek yang Beroperasi dapat ditambah yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Program.
- c. Sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Untuk Capaian lebih detail masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terlaksana di Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna tahun 2024 terinci dalam Tabel 2.1 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2024 dan Tabel 2.2 Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut.



Tabel 2.1
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2024.

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2024		
					Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		DINAS PERHUBUNGAN					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79	76,2	96,45
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	73	73
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Laporan	2	3	110
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1	100
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	27	90



NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2024		
					Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	59	98	110
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10	110
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	5	50
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	18	110
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	55	96	110
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	50	167	110
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	0	0
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	16	110
	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3	110
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100



NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2024		
					Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	100	110
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	10	100
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	10	100
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	100	110
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18	100
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	Persen	81	38,57	47,61
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten	Persen	68	207,41	110
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1	2	110
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	Unit	160	297	110



NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2024		
					Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tersedia				
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	55	149	110
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	1	1	100
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum perdesaan	Jumlah	1	2	110
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	Rasio	0,4	0,41	102,5
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Yang di Bangun dan Beroperasi	Persen	94	106,67	110



NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2024		
					Target Kinerja	Realisasi Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	1	1	100
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	3	1
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	12	12	100
	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah izin Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di terbitkan	Izin	1	1	100
	2.15.03.2.15.0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	1	7	1



Tabel 2.2
Rekap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2024.

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		
					Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		DINAS PERHUBUNGAN					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	80,0	76,2	95,25
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	73	73
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Laporan	2	3	110
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	Persentase	90		



NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		
					Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1	100
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	31	27	87,09
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	61	98	110
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10	110
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	5	50
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	18	110
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	56	96	110
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	167	110
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	0	0
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	16	110
	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3	110



NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		
					Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	100	110
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	10	100
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	10	100
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	100	110
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18	100
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	Persen	100	38,57	38,57
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten	Persen	70	207,41	110



NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		
					Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1	2	110
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	70	297	110
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	35	149	110
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	1	1	100
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum perdesaan	Jumlah	1	2	110
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100



NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024		
					Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	Rasio	0,4	0,41	102,5
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Yang di Bangun dan Beroperasi	Persen	98	106,67	108,8
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	1	1	100
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	3	110
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	12	12	100
	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah izin Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di terbitkan	Izin	1	1	100
	2.15.03.2.15.0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	1	7	110



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna

Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna adalah pelayanan di Bidang Perhubungan, yang meliputi:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
2. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.
5. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Jumlah Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas (Dokumen)
3. Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. Persentase Pelabuhan Yang di Bangun dan Beroperasi.
5. Jumlah Izin Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di terbitkan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna terdapat dalam Tabel 2.3 berikut :



Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna
Tahun 2022-2024.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target			Realisasi			Capaian		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LKJIP	78,16	78,5	78,9	79	62,55	71,9	76,2	79,7	91,12	96,45
2.	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Meningkatnya Pelayanan Transportasi	Persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan	66,25	69,23	73,8	76	69,72	78,36	73,8	100,71	106	97,10

Dari Tabel 2.3 terkait Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Infrastruktur Transportasi dengan indikator kinerja, yaitu Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, belum mencapai target 76 dimana realisasinya sebesar 73,8 atau dengan capaian kinerja 97,10 % (persen).

Sebagai bahan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada tahun ke 3 (Tiga) dari Rencana Strategis 2021-2026, berikut disampaikan Realisasi dan Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas
Tahun 2024.

No	Uraian	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %
1	Kinerja Anggaran	26,333,064,896.00	16,585,431,544.52	62,98
2	Kinerja Pendapatan Dinas	65.333.000,00	33.264.000,00	50,91

Dari Tabel 2.4. Persentase realisasi anggaran menunjukkan bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp. 26,3 miliar, yang telah terealisasi hingga saat ini sebesar Rp. 16,5 miliar atau sekitar 62,98 %. Persentase ini mengindikasikan bahwa realisasi anggaran masih relatif rendah, Kondisi ini disebabkan terjadinya Tunda Bayar Tahun 2024. Sedangkan Kinerja Pendapatan/Penerimaan Realisasi penerimaan sebesar Rp. 33,2 juta atau dikisaran 50,91 % dari target Rp. 65,33 juta, kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi masih jauh di bawah target yang ditetapkan untuk periode ini yang menunjukkan perlu ada evaluasi dan strategi untuk meningkatkan penerimaan di tahun yang akan datang.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal Kritis terkait Pelayanan Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam upaya menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan. Hal tersebut tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna. Pencapaian indikator pada Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2024 termasuk kategori sangat tinggi, ditunjukkan oleh tabel berikut;

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LKjIP	Nilai	79	76,2	96,45
2.	Meningkatnya Pelayanan Transportasi	Persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan	Persentase	76	73,8	97,10

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2024 disimpulkan, bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria sangat memuaskan, dengan rata-rata capaian sebesar 96,77 %.



2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Berikut ini isu-isu penting dan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

- 1) Keselamatan Lalu Lintas;
- 2) Pelayanan Publik;
- 3) Sarana dan Prasarana Jalan;
- 4) Trayek Angkota dan Angkudes;
- 5) Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi;
- 6) Kurangnya Regulasi (Perda) yang mengatur tentang Angkutan Umum (Orang/Barang);
- 7) Kurangnya Armada angkutan umum massal;
- 8) Belum tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 9) Masih Lemahnya Kompetensi SDM dalam Pengawasan Angkutan Umum;
- 10) Belum Maksimalnya Pengelolaan dan Penataan Parkir di tepi Jalan Umum;
- 11) Kurangnya ketersediaan tempat parkir tepi Jalan Umum, sehingga menggunakan badan jalan untuk kegiatan perparkiran (on street).



2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

- 1) Meningkatkan Pengawasan Peraturan tentang Angkutan Umum (orang/barang);
- 2) Meningkatkan Pendataan Kendaraan Angkutan Umum yang Laik operasional;
- 3) Meningkatkan Pengelolaan dan Penataan tempat parkir ditepi jalan umum;
- 4) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan sesuai dengan Rencana Kebutuhan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya adalah dengan:

- 1) Melengkapi Regulasi (Perda) tentang Angkutan Umum (orang/barang);
- 2) Perbaikan Manajemen Pendataan Pengawasan Kendaraan Angkutan Umum laik Operasional;
- 3) Menyediakan Sarana dan Prasarana Parkir ditepi Jalan Umum;
- 4) Mengusulkan Penambahan Anggaran dalam Penyediaan Sarana Prasarana Perhubungan; dan
- 5) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Program Diklat Teknis.



2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, sebagai berikut:

- 1) Membuat dan Menetapkan Regulasi (Perda) tentang Angkutan Umum (orang/barang);
- 2) Membuat Sistem Manajemen dan Pendataan Pengawasan Kendaraan Angkutan Umum laik Operasional yang ditunjang Teknologi Informasi;
- 3) Membuat dan Menetapkan Sarana dan Prasarana Parkir ditepi Jalan Umum;
- 4) Mengidentifikasi Rencana Kebutuhan Prioritas Kegiatan Sesuai Usulan; dan
- 5) Mengirimkan ASN untuk mengikuti Diklat Teknis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2026, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pada tahun 2026 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan khususnya di bidang perhubungan.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026
dari Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025–2029 dan tahap awal peletakan fondasi Visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan nasional tersebut menjadi acuan dalam perumusan arah pembangunan daerah agar selaras dengan prioritas nasional, khususnya dalam penguatan konektivitas, pemerataan pembangunan wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor perhubungan. Adapun Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara dengan Negara maju
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Penurunan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk Mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan, diantaranya:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5. Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan



Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara Negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.



Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tercantum pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, yaitu "Akselerasi Potensi Perekonomian Daerah dan SDM Didukung Kelembagaan Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel."

Dalam melaksanakan fokus pembangunan dan target pembangunan tahun 2026 sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan 3 (tiga) prioritas utama pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

- 1) Akselerasi ekonomi maritim, investasi, dan UMKM ramah lingkungan.
- 2) Peningkatan konektivitas antar wilayah, infrastruktur, dan ketahanan bencana.
- 3) Penguatan SDM, reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta pelestarian budaya Melayu.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Mendasarkan hasil perumusan isu strategis diatas, maka RKP Tahun 2026 menekankan percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas wilayah sebagai upaya memperkuat daya saing nasional dan daerah. Arah kebijakan ini sejalan dengan Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026, yaitu "percepatan pemerataan Pembangunan dan konektivitas antar pulau dalam rangka memperkuat daya saing daerah".

Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 menitikberatkan pada: (1) peningkatan pemerataan kualitas infrastruktur wilayah dan sarana ekonomi yang berwawasan lingkungan, (2) peningkatan pembangunan



konektivitas antar pulau guna mendukung percepatan pemerataan pembangunan.

Dalam konteks Kabupaten Natuna sebagai wilayah kepulauan, sektor perhubungan memiliki peran strategis dalam membuka aksesibilitas wilayah, mendukung mobilitas masyarakat, serta memperlancar distribusi barang dan jasa antar pulau.

Sebagai penjabaran awal RPJMN 2025–2029 dan implementasi Asta Cita, kebijakan nasional di bidang perhubungan diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur transportasi yang berwawasan lingkungan, penguatan keselamatan dan ketertiban transportasi, serta keterpaduan sistem transportasi. Kebijakan tersebut mendukung pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah dan penguatan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan daerah tersebut, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun dengan fokus pada peningkatan pemerataan kualitas infrastruktur perhubungan, serta penguatan konektivitas antar pulau sesuai kewenangan kabupaten, melalui pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pelabuhan pengumpan lokal, dan peningkatan keselamatan transportasi. Dengan demikian, sektor perhubungan diharapkan menjadi modal utama dalam mendukung percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing Kabupaten Natuna.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna

3.2.1. Tujuan Rencana Kerja

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan



pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 harus mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 yaitu "Meningkatkan Pemerataan Konektivitas antar Pulau melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel dengan Pemanfaatan Digital". dengan indikator "Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota", secara detail pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Tujuan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna 2026

Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 : Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan berkelanjutan serta Peningkatan Konektivitas Antar Pulau			
Tujuan	Indikator	Rumusan	Target
Meningkatkan Pemerataan Konektivitas antar Pulau melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel dengan Pemanfaatan Digital	Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	$K_{TDaerah} = (K_{TD} \times W_{TD}) + (K_{TL} \times W_{TL})$ Keterangan: • $K_{TDaerah}$: Konektivitas Transportasi Daerah • K_{TD}: Konektivitas Transportasi Darat • W_{TD}: Bobot Konektivitas Transportasi Darat (ditetapkan oleh daerah, dalam %) • K_{TL}: Konektivitas Transportasi Laut • W_{TL}: Bobot Konektivitas Transportasi Laut (ditetapkan oleh daerah, dalam %) Ketentuan: $W_{TD} + W_{TL} = 100\%$	60.40

3.2.2. Sasaran Rencana Kerja

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.



Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna yaitu;

- 1) Meningkatnya Pemerataan Konektivitas Antar Pulau; dan
- 2) Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah.

Adapun indikator sasaran pertama yaitu "Persentase Angkutan Penyeberangan", dan Indikator sasaran kedua terdiri dari 2 (dua) Indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Demikian pula dalam penetapan target dari indikator kinerja dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut.



Tabel 3.2.

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna 2026

No	Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pemerataan Konektivitas Antar Pulau	Persentase Angkutan Penyeberangan	Persentase Ketersediaan Trayek = $\frac{\text{Jumlah Trayek Tersedia}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek}} \times 100\%$	66.67
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2.30
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LHE Sakip dari Inspektorat Daerah	76.50



3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengarah Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.
- 2) Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2025-2029.

3.3.2. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan subkegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur. Anggaran untuk melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.



Tabel 3.3
Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	DINAS PERHUBUNGAN	17.896.749.961,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.896.749.961,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.896.749.961,00		
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.519.222.651,00		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.926.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.926.000,00	APBD	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.478.003.551,00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.478.003.551,00	APBD	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.740.100,00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.025.000,00	APBD	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.993.100,00	APBD	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.992.000,00	APBD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	APBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.730.000,00	APBD	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.931.000,00		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00		
	Pengadaan Mebel	0,00		



	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.931.000,00	APBD	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	APBD	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.980.000,00		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.380.000,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.630.064.000,00	APBD	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.578.000,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.388.000,00	APBD	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.190.000,00	APBD	
2,	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.901.047.700,00		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.901.047.700,00		
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0,00		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.545.007.000,00	APBD	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.356.040.700,00	APBD	
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	0,00		
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0,00		
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	0,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00		
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,00		



5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0,00		
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0,00		
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0,00		
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00		
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0,00		
3,	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	6.476.479.610,00		
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	506.479.610,00		
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	445.999.610,00	APBD	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0,00		
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	60.480.000,00	APBD	
2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0,00		
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	0,00		
3	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	5.970.000.000,00		
	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	5.970.000.000,00	APBD	
		17.896.749.961,00		

3.4 Cascading dan Crosscutting

Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauh mana perencanaan Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik,



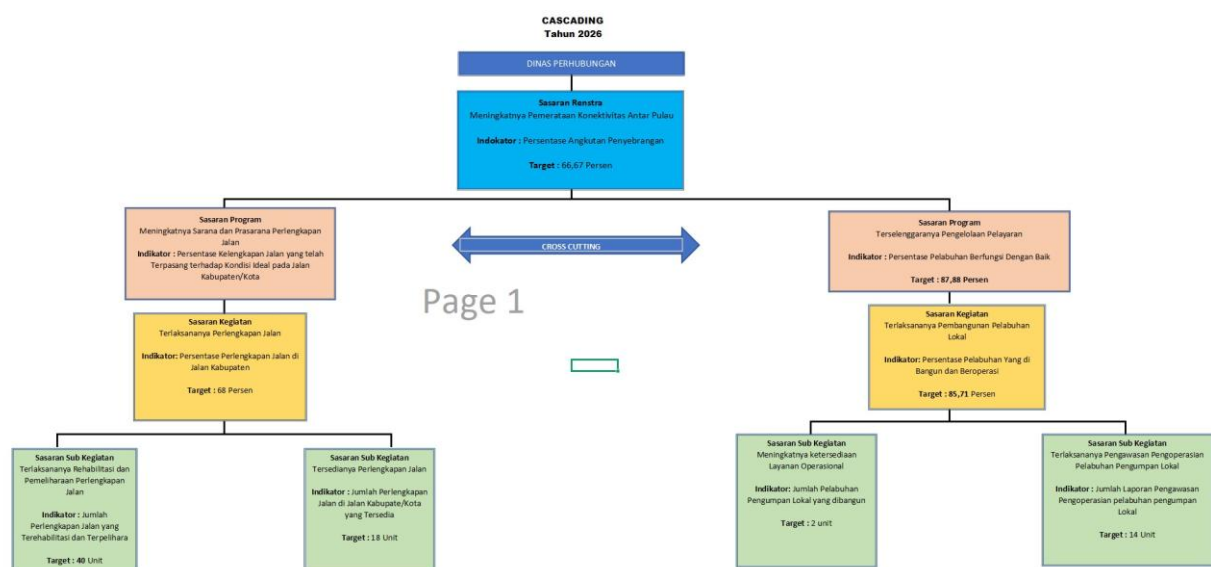
yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

3.4.1 Cascading

Cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.4 Cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Gambar 3.4

Cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026



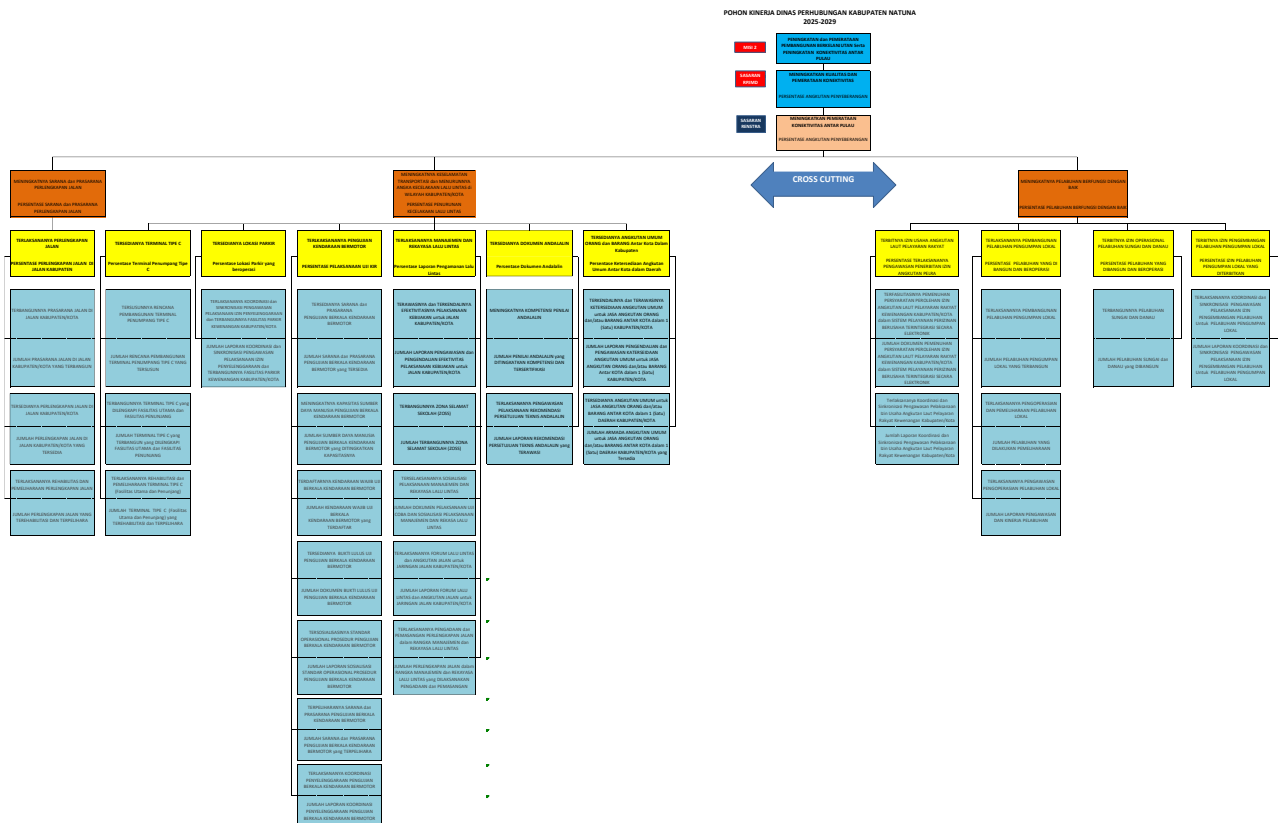
3.4.2 Crosscutting

Crosscutting Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor yang



beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada Gambar 3.5 Crosscutting Kinerja Program Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Gambar 3.5
Crosscutting Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Mempedomani RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 serta Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;
- 2) Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan bidang perhubungan dan sasaran Meningkatnya Pelayanan Transportasi dengan indikator Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Natuna;
- 3) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan daerah;
- 4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu- isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
- 5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan; dan



- 6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna memiliki Tiga (3) rumusan program, sembilan (9) rumusan kegiatan, dan Delapan Belas (18) rumusan sub kegiatan. Total Pagu Indikatif untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp.17.896.749.961,- (*Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Natuna. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan untuk Program ini sebesar **Rp.6.519.222.651,00**. Program ini diselenggarakan oleh Sekretariat terdiri dari 6 (Enam) Rumusan Kegiatan dan 13 (Tiga Belas) Rumusan Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu Indikatif/Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp.19.926.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu;
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan untuk sebesar Rp. 19.926.000,00.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan untuk untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.478.003.551,00 terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.3.478.003.551,00



3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 196.740.100,00 terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan yaitu;
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan Rp.25.025.000,00;
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.11.993.100,00;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.13.992.000,00;
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.145.730.000,00;
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 59.931.000,00 terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu;
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan untuk Rp. 24.931.000,00;
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan Rp. 35.000.000,00.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.648.044.000,00 terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu ;
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.600.000,00;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sejumlah Rp.13.380.000,00;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 2.630.064.000,00;



6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan Kegiatan ini adalah sebesar Rp.116.578.000,00- terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu ;
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.98.388.000; dan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 18.190.000,00.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Total Pagu indikatif untuk Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar **Rp.4.901.047.700,00**. Program ini diselenggarakan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari 1 (satu) Rumusan Kegiatan dan 2 (dua) Rumusan Sub Kegiatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.4.901.047.700,00., terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu ;
 - A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.3.545.007.000,00; dan
 - B. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.1.356.040.700,00.

C. Program Pengelolaan Pelayaran

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan untuk Program ini sebesar **Rp. 6.476.479.610,00**, Program ini diselenggarakan oleh Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri dari 2 (Dua) Rumusan Kegiatan dan 3 (tiga) Rumusan Sub Kegiatan, sebagai berikut :



1. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, Anggaran untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 506.479.610,00- terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu ;

- 1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 445.999.610,00;
- 2) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.60.480.000,00.

2. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal, dengan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.970.000.000,00- terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu ;

- 1) Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal, dengan Anggaran Rp. 5.970.000.000,00,-

Adapun Rincian Target Indikator Masing-masing Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagaimana terangkum didalam Tabel. 4.1 sebagai berikut.

Tabel. 4.1

RENCANA KERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN NATUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DINAS PERHUBUNGAN			17.896.749.961,00				62.284.447.234,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.266.685.961,00				60.092.447.234,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			15.266.685.961,00				60.092.447.234,00		
1,	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	65 Nilai	3.889.158.651,00			-	7.094.225.000,00		
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	19.926.000,00			-	39.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	19.926.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		39.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.478.003.551,00			-	4.956.025.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3.478.003.551,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4.956.025.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95 Persen	0,00			-	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55 Persen	196.740.100,00			-	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.025.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.993.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kel/Desa					
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.992.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	145.730.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		383.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55 Persen	59.931.000,00			-	1.330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		480.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		167.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24.931.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		294.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		49.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		340.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70 Persen	17.980.000,00			-	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	10 Laporan	4.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	10 Laporan	13.380.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran</i>	75 Persen	116.578.000,00			-	179.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	18 Unit	98.388.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		144.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	5 Unit	18.190.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2,	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan</i>	68 Persen	4.901.047.700,00			-	10.021.897.600,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten</i>	68 Persen	4.901.047.700,00			-	8.703.981.900,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.344.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	18 Unit	3.545.007.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6.267.721.900,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	449 Unit	1.356.040.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.092.260.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Jumlah Penumpang Angkutan Umum</i>	0 Penumpang	0,00			-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang									
			<i>Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>	1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	0,00			-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelaksanaan Uji KIR	0 Persen	0,00			-	606.561.900,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		606.561.900,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas	1 Dokumen	0,00			-	186.291.900,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		142.561.900,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		43.730.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah angkutan umum perdesaan</i>	1 Angkutan	0,00			-	125.061.900,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		125.061.900,00	DINAS PERHUBUNGAN	
3,	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Persentase Pelabuhan Berfungsi dengan Baik</i>	72 Persen	6.476.479.610,00			-	42.976.324.634,00		
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Persentase Pelabuhan yang dibangun dan beroperasi</i>	88 Persen	506.479.610,00			-	35.006.324.634,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun</i>	2 Unit	445.999.610,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		33.456.849.978,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal									
			<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara</i>	2 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.006.194.856,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal									
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	14 Laporan	60.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		543.279.800,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	<i>Persentase Pelabuhan Sungai Danau yang dibangun</i>	0 Persen	0,00			-	2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau									
			<i>Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun</i>	1 Unit	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk	-	-	5.970.000.000,00			-	5.970.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pelabuhan Pengumpan Lokal									
	2.15.03.2.15.0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal									
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	1 Unit	5.970.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5.970.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat yang sesuai SOP	80 Persen	2.630.064.000,00			-	2.192.000.000,00		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95 Persen	0,00			-	132.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		82.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran</i>	70 Persen	2.630.064.000,00			-	2.060.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	2.630.064.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.060.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	J U M L A H				17.896.749.961,00				62.284.447.234,00		



BAB. V

PENUTUP

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna;
2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
3. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026;
4. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Natuna dan Evaluasi Gubernur dan Kemampuan APBD tahun berjalan; dan
5. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan



melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Natuna.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna pada Tahun Anggaran 2026.

Ranai, 24 September 2025.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Natuna



ALLAZI, SE

NIP. 19670803 199303 1 001

